

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM
(ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang*



OLEH

DEVLIANA AURELLIN

2018/18060003

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM (ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA

Nama : Devliana Aurellin
BP/NIM : 2018/18060003
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2023

Mengetahui,
Kepala Departmen Ilmu Ekonomi



Dr. Novva Zulfa Riani, S.E. M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Pembimbing



Dr. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS
NIP. 19610502 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM (ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA

Nama : Devliana Aurellin
NIM/TM : 18060003/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji :

| No | Jabatan | Nama | TandaTangan |
|----|---------|-------------------------------|--|
| 1 | Ketua | : D Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S | 1.  |
| 2 | Anggota | : Isra Yeni, SE, M.SE | 2.  |
| 3 | Anggota | : Ariusni, SE, M.Si | 3.  |

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Devliana Aurellin |
| NIM/Th. Masuk | : 18060003/2018 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : AMP 3 KATIANGAN, 23 Desember 1999 |
| Jurusan | : Ilmu Ekonomi |
| Keahlian | : Ekonomi Sumber Daya Manusia |
| Fakultas | : Ekonomi |
| Alamat | : Pilubang, jorong pudung, kel. Bawan, kec. Ampek Nagari, kab. Agam |
| No. Hp/Telephone | : 082268344770 |
| Judul Skripsi | : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan perkapita dan Kemiskinan terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia. |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan kepala departemen program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 11 November 2022


 2A3AK09666216
 Devliana Aurellin
 NIM. 18060003

ABSTRAK

Devliana Aurellin (18060003) : “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia” Skripsi. Padang : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu DR. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, (2) pengaruh pendapatan perkapita, (3) pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi murni di Indonesia terhadap angka partisipasi murni di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2014-2021 yang diperoleh dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* dibantu software Eviews 9.

Variabel yang digunakan adalah angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas (Y), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2), kemiskinan (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (3) kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas di Indonesia..

Kata Kunci : Angka partisipasi murni, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, Kemiskinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Murni di Indonesia”.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas. Bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih kepada Ibu DR. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku pembimbing penulis yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan masukan serta arahan dengan ikhlas demi kesempurnaan skripsi ini. Berikutnya, dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang sangat berjasa dalam mendidik penulis dengan rasa tulus dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, S.E., M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

4. Ibuk Israyeni SE. M. SE dan ibuk Ariusni, SE. M. Si selaku penguji yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
7. Senior-senior departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 2018 tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat, keceriaan dan mengukir cerita indah tak terlupakan untuk kehidupan penulis selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Para sahabat terdekat yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi ladang ibadah bagi penulis, akhir kata penulis ucapkan *jazakumullahu khairan*.

Padang, Oktober 2022

Penulis

Devliana Aurellin

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | IV |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3.Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4.Manfaat Penelitian..... | 12 |
| II.KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1.Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka | 14 |
| 2.1.1 Teori Human Capital | 14 |
| 2.1.2 Teori Human Investmen | 16 |
| 2.1.3 Teori Net Entrolment | 20 |
| 2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah | 23 |
| 2.1.5. Teori Pendapatan perkapita | 29 |
| 2.1.6. Teori Kemiskinan | 32 |
| 2.1.7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, dan Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia | 38 |
| 2.1.7.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan Dengan angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia | 38 |
| 2.1.7.2 Hubungan Pendapatan perkapita dengan Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia | 39 |
| 2.1.7.3. Hubungan Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia | 40 |
| 2.2.Penelitian Terdahulu..... | 41 |
| 2.3.Kerangka Konseptual | 43 |
| 2.4.Hipotesis | 44 |
| III.METODE PENELITIAN | 45 |
| 3.1.Jenis dan Sumber data | 45 |
| 3.1.1.Jenis Data | 45 |
| 3.1.2.Tempat dan Waktu Penelitian | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.3.Sumber Data..... | 46 |
| 3.1.4.Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| 3.2.Defenisi Operasional..... | 47 |
| 3.3.Analisi Data..... | 48 |
| 3.3.1.Analisis deskriptif..... | 48 |
| 3.3.2. Analisis induktif..... | 49 |
| 3.3.3.Estimasi parameter model..... | 49 |
| 3.3.4.Pemilihan model terbaik..... | 51 |
| 3.3.5.Uji asumsi klasik..... | 53 |
| 3.3.6.Uji statistik..... | 54 |
| IV.HASIL dan PEMBAHASAN..... | 56 |
| 4.1.Hasil Penelitian..... | 56 |
| 4.1.1.Gambar lokasi Penelitian..... | 56 |
| 4.1.2.Analisis Deskriptif..... | 58 |
| 4.1.3.Analisis Induktif..... | 61 |
| 4.2.Pembahasan..... | 72 |
| 4.2.1.Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia..... | 72 |
| 4.2.2.Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia..... | 74 |
| 4.2.3.Pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-propinsi di Indonesia..... | 76 |
| V.KESIMPULAN..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| LAMPIRAN..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1.Jumlah Sekolah Menengah Atas di Indonesia | 3 |
| 1.2.Alokasi Anggaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Indonesia..... | 6 |
| 1.3.Angka Partisipasi murni SMA di Indonesia | 6 |
| 1.4.PDRB Perkapita Di Provinsi di Indonesia | 6 |
| 1.5.Persentase Penduduk Miskin di Indonesia | 9 |
| 3.1.Defenisi operasional..... | 47 |
| 4.1 Perkembangan jumlah penduduk Indonesia | 57 |
| 4.2.Angka partisipasi murni SMA di Indonesia | 58 |
| 4.3.Anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia..... | 59 |
| 4.4. PDRB perkapita di Indonesia | 60 |
| 4.5.Persentase penduduk miskin di Indonesia..... | 61 |
| 4.6.Uji Chow | 62 |
| 4.7.Uji Hausman | 64 |
| 4.8.Uji Lagrange multiplier | 64 |
| 4.9.Hasil estimasi Random Effect Model | 65 |
| 4.10.hasil uji multikolinearitas | 66 |
| 4.11. Hasil uji Heterokedastisitas | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 2.1. Kurva pertumbuhan pengeluaran menurut Warger | 28 |
| 2.2. Kurva lorenz | 35 |
| 2.3. Kurva rasio gini..... | 36 |
| 2.4. Kerangka konseptual | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan adalah aspek penting di kehidupan masyarakat yang berperan memajukan kualitas hidup, makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Untuk memenuhi sasaran tersebut, beragam usaha dilakukan pemerintah, contohnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak

semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Indikator yang biasa digunakan guna menuju keberhasilan dengan program pembangunan pendidikan, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, memanifestasikan kesetaraan untuk pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan (Kemendikbud, 2013)

Tema pembangunan Indonesia khususnya dibidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN III 2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya dengan meningkatkan SDM dengan menambah fasilitas berupa pembangunan sekolah khususnya sekolah menengah atas sebab sekolah menengah atas di Indonesia terbilang cukup rendah dibandingkan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar sehingga diharapkan pembangunan sekolah menengah atas akan mencetak lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (BPS, 2019). Pemerataan pembangunan sekolah menengah atas di Indonesia setiap tahunnya

mengalami peningkatan hal ini dapat di lihat pada Table 1.1 disajikan data jumlah sekolah menengah atas di Indonesia pada Tahun 2014-2021:

Tabel 1.1 jumlah Sekolah Menengah Atas
Provinsi Indonesia Tahun 2014-2021

| Tahun | Jumlah Sekolah Menengah Atas (unit) | Laju(%) |
|-------|-------------------------------------|---------|
| 2014 | 12.409 | - |
| 2015 | 12.513 | 0.84 |
| 2016 | 12.689 | 1,41 |
| 2017 | 13.495 | 6,35 |
| 2018 | 13.683 | 1.39 |
| 2019 | 13.944 | 1.91 |
| 2020 | 13.853 | -0.65 |
| 2021 | 13.995 | 1.03 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2022).

Pada table 1.1 di atas rata-rata laju jumlah sekolah menengah atas mengalami fluktuasi yang mana rata-rata laju pada 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun sebelumnya sebesar 1,41 persen kemudian meningkat sebesar 6,35 persen hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang terus melakukan perluasan akses layanan pendidikan. Pada awal tahun 2015 pemerintah hanya membuat pondasi kebijakan pembangunan, pada tahun 2016 pemerintah melakukan percepatan langkah dan bekerja secara nyata sehingga pada tahun 2017 pemerintah melakukan pemerataan pembangunan secara merata di Indonesia sehingga tahun-tahun selanjutnya pembangunan sekolah terus meningkat selama periode analisis (kemendikbud,2017).

Hal Ini akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia, ini disebabkan karena jumlah sekolah menengah atas tersebut mengalami peningkatan pembangunan Sekolah Menengah Atas.

Pemilihan angka partisipasi murni dalam penelitian ini dikarenakan angka partisipasi murni merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu, yang mana di Indonesia sendiri angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas memiliki jumlah yang rendah dibandingkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah.

pernyataan tersebut diketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah hingga saat ini di Indonesia adalah pendidikan yang masih belum merata. faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang merata adalah kemiskinan, SDM (sumber daya manusia), rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi dan sarana dan prasarana sekolah (BPS 2022).

Daerah di Indonesia yang kualitas pendidikannya yang kurang ialah Indonesia bagian timur. Karena, disana bukan hanya sarana dan prasarananya yang kurang tetapi tenaga pendidikannya juga kurang, sehingga masih membutuhkan tenaga pendidik dari luar daerah dan dana serta pembanguna sekola sehingga terlihat dengan hanya beberapa provinsi saja yang memperlihatkan prestasi, Hanya beberapa provinsi seperti Indonesia Bagian Barat saja yang memadai fasilitas sarana dan prasaran serta memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan

dengan prestasinya sedangkan Indonesia Bagian Timur lainnya belum terlihat (BPS 2018).

Dalam mengatasi masalah ketidakmerataan angka partisipasi di bidang pendidikan ini, pemerintah pusat membuat program untuk angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah seperti pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya di Indonesia melalui RPJP 2005-2025 berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada sebagian besar provinsi di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana yang tertera pada tabel 1.2 yang menyajikan data alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2013-2019 (Dalam Rupiah)

| Tahun | Anggaran Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp) | Laju(%) |
|-------|--|---------|
| 2014 | 9,483,904,789,059 | - |
| 2015 | 7,567,399,650,433 | -20.21 |
| 2016 | 14,625,563,241,241 | 93.27 |
| 2017 | 41,174,096,175,007 | 181.52 |
| 2018 | 64,459,470,523,424 | 56.55 |
| 2019 | 129,785,110,566,541 | 101.34 |
| 2020 | 137,689,225,974,132 | 6.09 |
| 2021 | 105,368,384,188,166 | -23.47 |

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.(2022)

Table 1.2 diatas pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 137,689,225,974,132 rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang terendah berada pada tahun 2015 sebesar 7,567,399,650,433 rupiah. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia laju pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 101.34 persen dari tahun sebelumnya sebesar 56.55.

Terjadinya peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2016 hingga 2021 terutama disebabkan adanya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19 dimana sebagian besar anggaran disebabkan oleh kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah serata Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kebijakan bantuan dana seperti beasiswa dan peningkatan SDM (Kementerian keuangan,2021)

Pernyataan di atas pada alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan mempengaruhi angka partisipasi Murni dimana ketika Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami peningkatan maka angka partisipasi murni di Indonesia akan mengalami peningkatan pula. Hal ini di dukung dengan adanya penelitian yang di lakukan oleh (weriantoni et al,2017) menyatakan bahawa terdapat hubungan positif antara pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan terhadap angka partisipasi murni SMA/SMK. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Elfarabi,2018) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Angka partisipasi kasar.

Penjelasan diatas dapat di tampilkan angka partisipasi murni pada tabel 1.3 dibawah ini yang menampilkan jumlah serta laju pertahun APM pada jenjang SMA di Indonesia pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni SMA di Indonesi
Tahun 2014-2021 (dalam persen)

| Tahun | Angka Partisipasi Murni SMA (%) | Laju(%) |
|-------|---------------------------------|---------|
| 2014 | 59.35 | - |
| 2015 | 59.71 | 0,61 |
| 2016 | 59.95 | 0,40 |
| 2017 | 60.37 | 0,70 |
| 2018 | 60.67 | 0.50 |
| 2019 | 60.84 | 0.28 |
| 2020 | 61.25 | 0.67 |
| 2021 | 61.65 | 0.65 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2022).

Table 1.3 di atas angka partisipasi murni di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana angka partisipasin murni tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 61.65 persen yang artinya sekitar 60 persen penduduk indoensia yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang sekoah menenga atas. Sedangkan angka partisipasi murni terendah atau terkecil berada

pada tahun 2014 sebesar 59.35 yang artinya sekitar 59 persen penduduk Indonesia yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang sekolah menengah atas.

Rata-rata laju Angka partisipasi murni SMA mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28 hal ini terjadi diakibatkan terjadinya *learning loss* yang signifikan selama pandemi covid-19 seperti adanya putus sekolah.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi murni di Indonesia sendiri masih rendah dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Sekolah (BPS,2022). Sehingga guna meningkatkan APM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:(Bappeda banten, 2018) :

1. Strategi kebijakan pemerataan akses pendidikan

Peningkatan akses keterjangkauan dilakukan melalui dua hal , pertama melalui pembiayaan operasional sekolah melalui dana BOS dan BOPDA dan kedua melalui pembangunan unit sekolah baru, dan ruang kelas baru maupun rehab ruang belajar

2. Strategi peningkatan peran SKPD

Pencapaian target akses pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama atas masyarakat, pemerintah maupun swasta. Koordinasi lintas SKPD dengan pembagian kewenangan menjadi kunci sukses program peningkatan akses pendidikan

3. Strategi peningkatan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
4. Strategi peningkatan anggaran pendidikan 20%
5. Mewujudkan dan mengkampanyekan gerakan wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan stakeholder.
6. Pemerataan dan penambahan tenaga pendidik kependidikan Program pengembangan model *back to school*.

Dengan adanya strategi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia sendiri akan menjadi lebih baik. Pendidikan sendiri memiliki keterkaitan dengan produktivitas seseorang. Hal ini dapat dilihat ketika Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar, dan berpengaruh pada pendapatan dan gaji yang lebih tinggi kemudian akan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi keluarganya, sebaliknya pendapatan perkapita dapat memperlancar pendidikan.

Penjelasan diatas dapat di tampilkan pendapatan perkapita menggunakan indikator PDRB perkapita atas harga konstan pada tabel 1.4 yang mana pada, tabel di bawah ini menampilkan jumlah dan laju Pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.4 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan
di Indonesia
Tahun 2014-2021 (RibuRupiah)

| Tahun | PDRB Per kapita (Rp) | Laju(%) |
|-------|----------------------|---------|
| 2014 | 34127.72 | - |
| 2015 | 35161.89 | 3,03 |
| 2016 | 36468.62 | 3,72 |
| 2017 | 37851.37 | 3,79 |
| 2018 | 39340.56 | 3,93 |
| 2019 | 41021.61 | 4,27 |
| 2020 | 39778.89 | -3,03 |
| 2021 | 40775.88 | 2,51 |

Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)

Table 1.4 diatas PDRB perkapita di Indonesi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 40775.88 ribu rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah berada pada tahun 2014 sebesar 34127.72 ribu rupiah. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia rata-rata laju PDRB perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 namun, pada tahun 2020 PDRB perkapita mengalami penurunan sebesar -3,03 hal ini disebabkan oleh Covid-19. Menurut *world bank country* menunjukkna bahwa pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan perkapita hampir disemua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan ini membuat indonesia kembali masuk pada kategori berpendapatan bawah (kementrian keuangan,2021)

Terjadinya penurunan Pendapatan Perkapita akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia dimana ketika terjadinya penurunan

Pendapatan Perkapita di Indonesia berakibat pada menurunnya angka partisipasi murni di Indonesia namun, sebaliknya ketika pendapatan perkapita meningkat maka angka partisipasi murni di Indonesia akan meningkat hal ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elfarabi, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara PDRB perkapita terhadap angka partisipasi kasar serta penelitian yang dilakukan oleh (Fibriani, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara DPRB perkapita terhadap angka partisipasi murni.

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinn yang mana tingkat kemiskinan ini diukur menggunakan Presentase Penduduk Miskin (BPS 2022). Presentase penduduk miskin di provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana terlihat pada table 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2014-2021 (dalam persen)

| Tahun | Presentase Penduduk Miskin (%) | Laju(%) |
|-------|--------------------------------|---------|
| 2014 | 10.96 | - |
| 2015 | 11.13 | 1,52 |
| 2016 | 10.70 | -3.86 |
| 2017 | 10.12 | -5.42 |
| 2018 | 9.66 | -4.55 |
| 2019 | 9.22 | -4.55 |
| 2020 | 10.19 | 10.52 |
| 2021 | 9.71 | -4.71 |

Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)

Pada table 1.5 di atas kemiskinan di Indonesia yang diukur dengan presentase penduduk miskin yang mana presentase penduduk miskin terendah pada tahun

2021 sebesar 9,71 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 11,13 persen..

Rata-rata laju presentase penduduk miskin di Indonesia cukup mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 presentase penduduk miskin mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,52 persen hal ini tentu saja diakibatkan oleh covid-19 yang mana ini berdampak buruk bagi suatu negara seperti terjadinya guncangan ekonomi dimana guncangan ekonomi baru ini akan memunculkan orang miskin baru yang mana ini akan membuat masyarakat miskin menjadi makin miskin (Baktinews,2020). Hal ini juga berdampak pada pendidikan ketika masyarakat tidak mampu untuk membiayai pendidikan sehingga membuat keluarganya menjadi putus sekolah, sehingga jika kemiskinan meningkat yang mana ini akan berpengaruh terhadap angka partisipasi murni SMA, dimana ketika presentase penduduk miskin meningkat maka angka partisipasi murni akan menurun di Indonesia, sebaliknya jika presentase penduduk miskin menurun maka angka partisipasi murni di Indonesia akan meningkat. Pernyataan ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlita et al,2019) yang menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar SMK. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadi,2020) menyatakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Dimana rata-rata lama sekolah mencakup secara luas sedangkan angka partisipasi murni mencakup pendidikan yang sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan sehingga peneliti lebih fokus pada APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Permasalahan serta prokontra yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (*gap*) dijelaskan diatas adalah penelitian ini menggunakan variable dependen yaitu APM yang mana APM dalam penelitian ini terfokus pada angka partisipasi murni karena menggunakan usia pada jenjang tertentu seperti pada penelitian ini menggunakan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas pada usia 16-18 tahun yang bersekolah tepat pada waktunya, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan angka partisipasi kasar, angka parrtisipasi sekolah dan rata lama sekolah yang mana tidak adanya batasan usia dalam memasuki jenjang pendidikan sesuai dengan umur atau cakupan usia yang lebih luas dan pemilihan variable independen yang berbeda serta cakupan wilayah dan tahun dalam penelitian ini juga berbeda.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis dapat mengangkat judul **Pengaruh Pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan perkapita dan Kemiskinan Terhadap APM SMA di Indonesia tahun 2014-2021 .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka memicu pertanyaan yang penting untuk dijawab seperti:

1. Sejuahmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendiddian terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?
2. Sejuahmana pengaruh pendapatan perkapita terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?

3. Sejauhmana pengaruh kemiskinan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita , kemiskinan secara simultan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

1.3 Tujuan

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan perkapita terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
3. Mengetahui kemiskinan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh belanja bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan secara simultan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini:

1. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat dipakai untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, kemiskinan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi

di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan serta perlunya pendidikan bagi masyarakat.

2. Mahasiswa

Adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya.

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

2.1.1. *Teori Human Capital*

Teori *human capital* atau modal manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1961 oleh Theodore W. Schultz. Analisis investasi dibidang pendidikan dan kesehatan disatukan dalam teori modal manusia. Pendidikan merupakan salah satu modal manusia dimana Modal manusia merupakan istilah yang sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas ketika hal tersebut ditingkatkan, investasi modal manusia dianalogikan seperti investasi modal fisik. Schultz(1961) mengemukakan bahwa manusia adalah suatu bentuk capital seperti halnya bentuk capital lainnya, seperti mesin dan teknologi. Tentu saja pendidikan ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kesejahteraan. (Todaro & Smith, 2011)

Teori modal manusia mengasumsikan bahwa pendidikan menentukan produktivitas marginal tenaga kerja dan ini menentukan pendapatan, sejak tahun 1960-an modal manusia telah mendominasi ekonomi, kebijakan dan pemahaman publik mengenai hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Dimana pendidikan tinggi adalah persiapan untuk bekerja (Maginson, 2019).

Human capital Theory (HRC) telah menjadi salah satu landasan paling kuat dari rencana kebijakan pendidikan diseluruh dunia serta di dalam sistem

pendidikan nasional yang pengaruh modal manusia cukup besar. Modal manusia mendukung pendidikan sebagai investasi yang menghasilkan pengembalian pada waktunya bagi individu dalam hal gaji dan bagi negara sebagai dalam hal lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi (Gillies, 2015).

Modal manusia untuk pendidikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, dan dimuat untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional yang penting, dimana modal manusia menyiratkan bahwa kebijakan yang mendukung pendidikan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi lebih cepat serta pengentasan kemiskinan (Holden,2017)

Seiring berkembangnya teori ini, konsep human capital dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia. Seperti pengetahuan, dan keterampilan.hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang meyakini bahwa human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

Konsep kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa human capital merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alank et al 2008) konsep ini menganggap human capital tidak berasal dari pengalaman manusia

Jhing (2010) yang mengartikan pembentukan modal manusia sebagai proses memperoleh dan meningkat keahlian, pendidikan dan pengalaman penduduk yang turut serta dalam menentukan pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu pembentukan modal manusia terkait dengan investasi pada manusia dan pengembangan sebagai suatu sumber yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang pada gilirannya turut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Teori Human Investmen

Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sesuat yang dapat diukur dengan nilai uang dengan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan (Hanapih, 2011). Penghasilan yang diperoleh pada masa akan datang adalah konsumsi yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih pula.

Menurut (Mankiw, 2013), secara umum Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa investasi modal fisik maupun investasi modal manusia. Investasi fisik (*physical investment*) yakni semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal. Sedangkan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan skill.

Menurut (Todaro & Smith, 2011), modal manusia memiliki pengertian persediaan pengetahuan, keahlian kompetensi, keterampilan, kesehatan dan cita-

cita yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang pendidikan, program perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Di satu sisi pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya perbaikan modal manusia sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

Babalola (2003) menjelaskan bahwa alasan yang mendasari investasi pada *human capital* didasarkan pada tiga argumen, yaitu (1) bahwa generasi baru harus diberikan pengetahuan (yang relevan) yang terakumulasi dari generasi sebelumnya. (2) bahwa generasi baru harus diajarkan bagaimana pengetahuan seharusnya digunakan untuk mengembangkan produk baru, menawarkan proses dan metode produksi yang baru dan memberikan pelayanan. (3) bahwa seseorang harus terus di pacu untuk mengembangkan seluruh ide, produk, proses dan metode melalui pendekatan yang kreatif.

Menurut teori modal manusia, pengetahuan dan keterampilan yang tergabung dalam individu dapat disebut sebagai modal dan semua kegiatan yang dengannya input saat ini menghasilkan hasil di masa depan sementara produktivitas individu tumbuh dapat diartikan sebagai investasi (Kiss, 2012).

Akumulasi pengetahuan dan modal manusia memiliki efek langsung pada efisiensi. Di negara maju, dimana pertumbuhan produk domestik bruto telah dinaikkan, tingkat pelatihan karyawan secara langsung meningkatkan kehidupan kerja mereka. Sebagian besar manfaat sosial, berasal dari akumulasi modal

manusia, seperti kesehatan yang baik, lebih banyak pekerjaan perkotaan, pengurangan kejahatan, dan peningkatan korelasi sosial akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Schaubroeck et al, 2005).

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan di masa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia, investasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *private investment* dan *public investment* (Todaro & Smith, 2011).

Teori modal manusia mendalilkan bahwa pendidikan itu mahal, butuh waktu yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu yang lain dan ketika berhasil diselesaikan memberi kita pengembalian dan karena itu harus dilihat sebagai investasi (Galor&Moav, 2006). Para pekerja mendapatkan pengembalian investasi mereka sendiri dalam bentuk upah yang lebih tinggi dan peningkatan standar hidup.

Teori modal manusia lebih cocok di negara-negara dengan pertumbuhan populasi tinggi, karena sumber daya manusia yang luas yang mungkin menjadi modal manusia. Sumber daya manusia dapat ditransformasikan menjadi modal manusia melalui input seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab terbesar untuk memfasilitasi akumulasi modal manusia, dan memiliki manfaat pribadi dan sosial dalam hal standar kehidupan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi. Agar sumber daya manusia

dapat diterjemahkan ke dalam sumber daya manusia, pasokan sekolah berkualitas baik sangat penting (UNDP, 2011)

Investasi modal manusia sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan *rate of return* (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Biayanya adalah dalam bentuk biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan *opportunity cost* dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Harapan dari investasi ini adalah memperoleh manfaat yang jauh lebih besar (Atmanti,2005).

Jika dilihat dari perspektif investasi modal manusia, keputusan untuk langsung bekerja maupun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terlebih dahulu didasarkan pada keuntungan yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama melanjutkan kuliah di perguruan tinggi menjelaskan setiap tambahan satu tahun sekolah berarti dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, individu yang melanjutkan sekolah mengeluarkan biaya secara langsung. Penerimaan penghasilan dapat dihitung menggunakan net present value. Present value ini dibedakan dalam dua hal, yaitu apabila pendidikannya hanya sampai SMA atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi sebelum bekerja (Kaufman,B.E & Hotchkiss, 1999;58).

Waktu menempuh pendidikan adalah determinan utama untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga dapat dikatakan seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Atas dasar ini data mengenai lamanya bersekolah (*years of schooling*) dapat digunakan dalam mengestimasi pengembalian pendidikan (*return to education*) dan membandingkan lintas negara, meskipun dengan sistem pendidikan yang berbeda (Krueger, 2000).

2.1.3 Teori *Net Entrolment*

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010:46).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepa t di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan (BPS, 2022).

Menurut teori human capital bahwa pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor terpenting akan menghasilkan individu yang mamiliki produktivitas tinggi

(Schultz, 1961). Semakin tinggi pendidikan individu maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas individu tersebut dalam proses pembangunan dan menyebabkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga.

Menurut Dreher, et al.(2006) bahwa ada faktor permintaan dan penawaran yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Beberapa faktor permintaan yang mempengaruhi antara lain : (1) Pendapatan perkapita. (2) Tingkat melek huruf usia dewasa. (3) Jumlah sekolah dan tingkat urbanisasi penduduk. Sedangkan dari faktor penawaran yaitu (1) Rasio guru terhadap murid. (2) Biaya pendidikan. (3) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

Partisipasi sekolah berhubungan dengan kegiatan pendidikan formal maupun nonformal, baik itu belum/tidak pernah bersekolah, masih bersekolah, atau tidak bersekolah lagi (*drop out*). Partisipasi sekolah sebagai salah satu parameter mendasar yang dipakai dalam mengukur seberapa besar aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan terutama penduduk usia sekolah ditunjukkan melalui persentase dari penduduk yang tidak pernah bersekolah terhadap populasi keseluruhan penduduk.

Terdapat pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar partisipasi pendidikan, yaitu diantaranya:

1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan (BPS,2022).

Rumus:

$$APM = \frac{\text{Jumlah murid umur kelompok sekolah di tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur tertentu}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (BPS 2022).

Rumus :

$$APS = \frac{\text{Jumlah penduduk kelompok umur tertentu yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur tertentu}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah

penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.(BPS 2022).

Rumus:

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur tertentu}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Nilai APM berkisaran antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anakn usia sekolah dapat bersekolah tepat pada waktunya, maka APM akan mencapai 100 persen. secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (BPS, 2022).

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004).

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian yaitu menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan begitu erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Adanya kebijakan otonomi daerah yang salah satunya diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan diharapkan mampu mencapai optimalisasi kinerja pemerintahan daerah.

Berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, tugas serta tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran (APBD) yang merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam konteks anggaran berbasis kinerja merupakan sesuatu yang urgent untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sehingga memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi relokasi sumber daya dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2006).

Penelitian Herrera & Pang (2005) mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang. Mereka menggunakan pengeluaran pemerintah per kapita untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai input. Sementara untuk output mereka menggunakan pendaftaran sekolah dasar (kotor dan bersih), pendaftaran sekolah menengah (kotor dan bersih), melek huruf kaum muda, rata-rata tahun sekolah, tingkat pertama selesai, tingkat kedua selesai, dan skor pembelajaran untuk sektor pendidikan dan harapan hidup saat lahir, imunisasi (DPT dan campak), dan harapan hidup yang disesuaikan dengan disabilitas (DALE) untuk sektor kesehatan.

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 2001) :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2. Hukum wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3. Teori peacock & wiseman

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1989) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap

menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar (Mangkoesobroto,2001).

Teori Adolf Wagner

Wagner's law adalah prinsip yang dinamai menurut ekonom Jerman Adolph Warger (1835-1917). Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya

fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

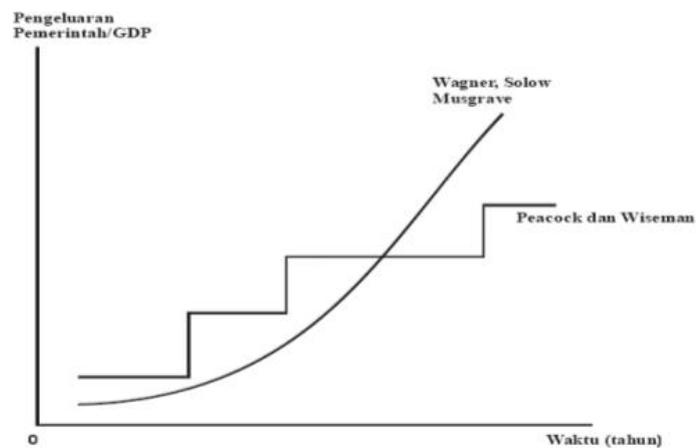
$$\frac{PKPP_1}{PPK_1} < \frac{PKPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{PKPP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

PPKN : Pengeluaran Pemerintah Perkapita

PPK: Pendapatan perkapita, yaitu DGP/ jumlah penduduk

1,2,..n: Jangka waktu(tahun)



Gambar 2.1. Pertumbuhan pengeluaran menurut Wagner

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkast (Mangkoesoebroto,2001).

Teori Peacock dan Wiseman

Model Peacock-Wiseman (1961) teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. (Mangkoesebroto,2001).

2.1.5. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita menurut sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun pendapatan perkapita biasanya dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah.

Ketergantungan sumber daya alam memiliki pengaruh negatif pada pendapatan perkapita terutama negara-negara dengan aturan hukum atau kebijakan yang buruk (ploeg,2011)

Pendapatan perkapita juga merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup. Negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi umumnya memiliki standar hidup yang tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup negara kaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan dengan angka harapan hidup, tingkat kesehatan, pendidikan) dibandingkan negara miskin(mankiw, 2006)

Todaro & smith (2011) mengatakan ketika orang-orang berpendapatan rendah tidak dapat meminjam uang, mereka umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik atau tidak dapat memulai atau memperluas usahanya. Hal ini menjelaskan suatu hubungan antara

pendidikan yang ditempuh dengan seberapa besar pendapatan yang diperoleh. Ketidak merataan pendidikan yang terjadi dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita di masyarakat dalam menghadapi diri dan keluarga.

Negara pertaman yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep produk nasional bruto adalah Amerika Serikat pada tahun 1968. Negara ini baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep produk domestik bruto sejak tahun 1991.

Cara perhitungan pendapatan perkapita adalah menjumlahkan pendapatan seluruh penduduk suatu negara dengan pada tahun tertentu. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk negara bersangkutan pada periode tahun yang sama:

$$\text{Pendapatan perkapita} = \frac{PDB(\text{produc domestic bruto})}{\text{jumlah penduduk}} \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{pendapatan perkapita} = \frac{PDRB(\text{produc domestic regionsl bruto})}{\text{jumlah penduduk}} \dots\dots\dots(5)$$

2.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang (BPS, 2022). Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan

akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidakbanyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat bentuk, adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004) :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan kondisi yang mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan,sandang, kesehatan,perumahan, pendidikan, yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan sebagian bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan penndapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

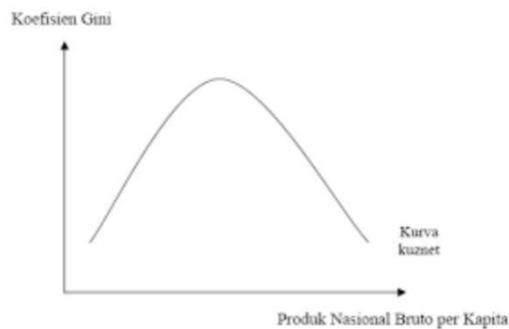
Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Pengukuran yang sering dilakukan negara berkembang yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang mana kemiskinan absolut ini adalah situasi ketidak mampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal (Todaro & Smith, 2011).

Menurut Sukirno (2013) distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan absolut dan relatif. Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dimulai darimulainya suatu hipotesis yaitu hipotesis “ U-terbalik ” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet (1955) dapat dilihat kurva Kuznet di bawah ini:

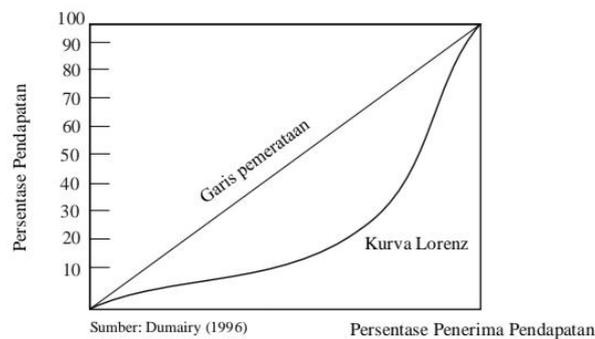


Sumber: Todaro (2006)

Gambar 2.2 kurva lorenz

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara (Todaro, 2006)

Untuk melakukan penilaian menyeluruh mengenai kesejahteraan di negara-negara berkembang (kerangka berpikir serupa dapat diterapkan dalam bidang kesehatan dan pendidikan). Pengukuran ketimpangan pendapatan dapat dilihat menggunakan kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang memperkenalkan tersebut adalah Conrad Lorenz (1905). Yang mana kurva Lorenz dapat dilihat pada kurva di bawah ini:



Gambar 2.3 kurva rasio gini

Kurva diatas menunjukkan hubungan kuantitatif antara presentase penduduk dan presentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Sehingga tidak ada satu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna ataupun ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya. Mekanisme kurva-kurva lorenz untuk setiap negara akan terletak disebelah kanan. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurva lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah (Arsyad, 2004).

Pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun, tetapi kurva lorenz akan selalu berpotongan, yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat membuat pernyataan yang akan ambigu tentang perubahan dalam ketimpangan

relatif. Tingkat ketimpangan mungkin akan bisa membaik atau justru memburuk. Fields menunjukkan bahwa jika pengalaman pertumbuhan dengan epologi pertumbuhan perluasan sektor modern yang mendominasi dalam kenyataan, maka ketimpangan akan memburuk di tahap-tahap awal pembangunan yang kemudian akan membaik perpotongan kurva Lorenz.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (interregion income gap (Harahap, 2006).

Menurut (Todaro & Smith, 2011), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional di negara-negara terbelakang rendah dan laju pertumbuhannya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami *stagnasi*.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang dan tidak merata.
4. Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk, dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan negara maju.

6. Fasilitas pendidikan maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai.

Teori Adam Smith mengatakan bahwa ketika mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, tidak akan ada masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Dalam bukunya dalam buku "*The Wealth of Nations*", Adam Smith mengatakan bahwa, kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang alami, tetapi juga hal-hal yang ditentukan oleh aturan umum tentang kelayakan (Todaro, 2011).

2.1.7. Hubungan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, dan Kemiskinan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

2.1.7.1. Hubungan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Hubungan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki sifat positif. Dimana jika belanja pemerintah bidang pendidikan meningkat maka angka partisipasi juga meningkat karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka sarana dan prasarana seperti fasilitas-fasilitas sekolah lebih memadai sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Sebaliknya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menurun maka angka partisipasi murni SMA juga menurun. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap APM, serta

penelitian yang dilakukan Wardani et al (2020) untuk meneliti pengaruh belanja pendidikan pemerintah daerah terhadap akses pendidikan dasar dan menengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan dan karakteristik wilayah/ pulau berpengaruh terhadap akses pendidikan. Dimana pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap angka partisipasi murni SMP dan SMA.

2.1.7.2. Hubungan Pendapatan perkapita Dengan angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Pendapatan perkapita yang merupakan jumlah PDRB suatu kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di kabupaten/kota yang sama (BPS Indonesia, 2022). Agar dapat mencerminkan pendapatan nyata masyarakat di suatu daerah. Penelitian dalam bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Akpan (2011) dan Pena (2007) untuk melihat pengaruh pendapatan internal terhadap outcomes pendidikan berupa angka melek huruf dan angka melanjutkan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pendapatan internal dapat meningkatkan angka melek huruf, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan internal memiliki sifat positif terhadap angka melek huruf.

Begitu juga dengan angka partisipasi murni dalam hal ini APM SMA yang berfungsi untuk mengetahui proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya di jenjang SMA, dimana angka partisipasi tersebut didukung oleh pendapatan yang dicerminkan melalui pendapatan perkapita. Karena pendapatan perkapita dapat merefleksikan kemampuan pembiayaan yang dikeluarkan dari uang pribadi guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendapatan perkapit dengan angka partisipasi murni SMA memiliki sifat positif. Jika Pendapatan perkapita meningkat maka angka partisipasi murid SMA akan meningkat pula. Sebaliknya, jika pendapatan perkapita menurun maka angka partisipasi murid SMA juga ikut menurun.

2.1.7.3. Hubungan Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Kemiskinan yang diukur menggunakan presentase penduduk miskin menggambarkan kondisi sosial ekonomi. Dalam studi milik world bank menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan orang tua dengan pendidikan rendah menghadapi kemungkinan yang relative tinggi untuk mencapai tingkat pendidikan yang rendah dan memperoleh hasil yang lebih rendah untuk pendidikan mereka (world bank,2004). Penduduk miskin sering kali berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, yang dapat menurunkan produktivitas mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk mengelola dan menghasilkan pengetahuan. Dalam buku *Poverty reduction and growth: virtuous and vicious cirle* disebutkan bahwa keluarga dengan pendidikan rendah (khususnya mereka yang berpendidikan kurang dari sekolah menengah) cenderung miskin, dan pada gilirannya mereka cenderung tidak berinvestasi dengan cukup untuk pendidikan mereka dan anak-anak mereka untuk keluar dari kemiskinan(Perry et al, 2016).

Sehingga dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa ketika presentase penduduk miskin meningkat maka angka partisipasi murni akan menurun sebaliknya ketika presentase penduduk miskin menurun maka angka partisipasi akan meningkat, sehingga terdapat hubungan negative antara presentase penduduk

miskin terhadap angka partisipasi murni hal ini dikuatkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Herlita et al (2019) untuk melihat pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar sekolah menengah atas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh langsung negative dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar.

2.2. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian terkait Angka Partisipasi Murni oleh peneliti sebelumnya beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Purusa (2013) mengenai implikasi desentralisasi fiskal SD/MI di Kabupaten/kota Provinsi Jawa 2017-2010 dengan menggunakan dengan *outcome* pendidikan berupa angka partisipasi murni menggunakan analisis regresi data panel dengan hasil penelitian variabel desentralisasi fiskal dan PDRB perkapita memiliki pengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi murni SD/MI sedangkan rasio murid per guru SD/MI dan jumlah guru SD/MI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni SD/MI.

Penelitian yang dilakukan Weriantoni et al. (2017) mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap outcome pelayanan publik bidang pendidikan di provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Fix Effect Model*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja bidang pendidikan dan PDRB

perkapita signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013. Sedangkan rasio murid perguruan tinggi berpengaruh tidak signifikan terhadap APM SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 -2013.

Penelitian yang dilakukan Wawan Hermawan et al. (2018) mengenai *Determinants of Education Access in Indonesia* tahun 2011-2015 dengan menggunakan data Susenas dengan tahun 2011-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah Indonesia terhadap pendidikan. Namun tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio murid perguruan tinggi terhadap pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sedat Gumus dari Michigan State University dan Selim Kayhan dari Bozom University (2012) mengenai *The Relationship between Economic Growth and School Enrollments Turkey* tahun 1980-2008 dengan menggunakan Analisis VAR. Hasil penelitiannya ini terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara PDB perkapita dan tingkat partisipasi sekolah dan tidak ditemukan hubungan sederhana yang ditemukan antara PDB perkapita dengan angka partisipasi sekolah.

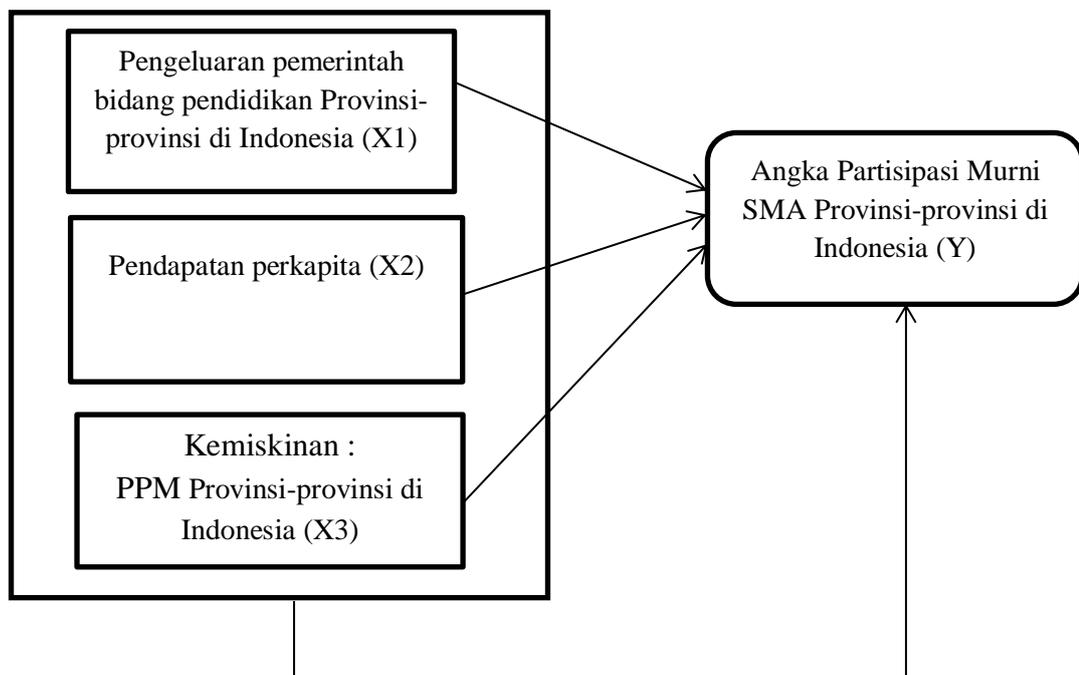
Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya seperti variabel dimana variabel yang peneliti gunakan berupa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas, cakupan daerah serta tahun yang digunakan.

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia. Semakin tingginya pendapatan seseorang yang tentu juga meningkatkan kesejahteraannya maka akan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Pemilihan variabel angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia dianggap mampu menjelaskan proporsi anak usia sekolah yang bersekolah di SMA yang tepat pada waktunya.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran, berikut ini gambar kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 2.4. Kerangka konseptual



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (berpengaruh signifikan)

2. Diduga pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

$H_0 : \beta_2 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

$H_a : \beta_2 \neq 0$ (berpengaruh signifikan)

3. Diduga kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

$H_0 : \beta_3 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

$H_a : \beta_3 \neq 0$ (berpengaruh signifikan)

4. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan kemiskinan berpengaruh Simultan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$ (berpengaruh signifikan)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.
3. Kemiskinan yang menggunakan indikator presentase penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.
4. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.

2.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat daerahnya terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,serta memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian Angka Partisipasi Murni yang optimal dan tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia.
2. Pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber daya daerah semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan belanja pendidikan untuk kemajuan masyarakat di daerahnya.
3. Penyediaan armada transportasi yang memadai terutama di daerah-daerah yang masih minim sarana transportasi umum.
4. Diharapkan masyarakat lebih aktif berperan serta dalam usaha pembangunan di daerahnya dan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
5. Penelitian selanjutnya sangat di harapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variable lain di luar variable pada penelitian, sehingga dapat di ketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi angka partisipasi murni SMA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Putro, P. R. (2016). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT . *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN*
- Diaz Luis Serrano & Enric Meix-Llop. 2019. Decentralization and the quality of public services: Cross-country evidence from educational data. *Journal Environment and Planning*. 0(0)
- Akhmad Noval Huda & Hadi Sasana. 2012. ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN. *JOURNAL OF ECONOMICS*. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1.
- Agung Ginanjar Rahmadi. 2020. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DI BIDANG PENDIDIKAN. *JOURNAL OF ECONOMICS*.
- Nurkholis Afid. 2016. TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA. *JOURNAL OF ECONOMICS*.
- Badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah (BAPPEDA) provinsi Banten. (2018). Kajian peningkatan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan tingkat menengah Provinsi Banten 2018. Badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah
- Giovanni Ridzky. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Journal of Economics Development analysis*.
- Mahrita Yolanda Sari & Chairul Sa'roni. 2020. Influence of Population Growth, Income Involvement, and Unemployment of Poverty Levels in South Kalimantan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 3 No. 2, 2020, hal 570-584.
- Septiana & Rusdiansyah. 2019. Influence Of PDRB, Population, and Unemployment on Poverty in Banjarmasin City. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 2 No. 1, 2019, hal 197-210.
- Sari Yolanda & Antony Falianto. 2020. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI. *JURNAL DEVELOPMENT*. VOL.8 NO.2